

Operasi Pasar Bersubsidi di Kota Bandung Tepat Sasaran

BANDUNG (IM)- Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyatakan, operasi pasar bersubsidi (Opadi) di Kota Bandung berjalan aman, kondusif dan tepat sasaran.

Opadi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota bertujuan menekan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri melalui pemberian subsidi.

Opadi digelar serentak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sejak 1 April dan berakhir pada 5 April 2024. Pemda Provinsi Jawa Barat menyalurkan sekitar 2.800 pak untuk Opadi di Kota Bandung.

“Mudah-mudahan Opadi ini, bisa meringankan beban untuk bapak ibu sekalian. Keluarga penerima manfaat Opadi ini tepat sasaran, sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Dinas Sosial (Dinaos) Kota Bandung,” kata Bambang Tirtoyuliono, Kamis (4/4).

Pihaknya pun mengingatkan masyarakat Kota Bandung, agar tidak panik membeli pada momen menjelang Idul Fitri.

“Kepada seluruh masyarakat Kota Bandung, saya sampaikan bahwa ketersediaan pangan sampai hari H Idulfitri aman, jadi tidak usah panic buying (panik membeli),” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Noneng Ko-

mara menyampaikan, Opadi merupakan cara pemerintah membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga wajar, juga dapat menekan inflasi.

“Komoditas yang dijual pada gelaran Opadi ini adalah paket beras premium kemasan 5 kg, gula premium kemasan 2 kg dan minyak goreng premium kemasan 2 liter,” kata Noneng Komara.

Dalam harga normal, paket tersebut dibandrol dengan harga Rp146.700. Namun setelah disubsidi, masyarakat bisa membelinya di Opadi dengan harga Rp101.000 atau mendapat subsidi sebesar Rp45.700.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bulog Jawa Barat, M Attar Rizal menyampaikan, stok beras di Jawa Barat hingga lebaran Idul Fitri terbilang aman.

“Sampai lebaran saya pastikan stok beras di Jawa Barat cukup aman, dan yang bapak ibu beli ini dalam gelaran Opadi merupakan stok serapan di Jawa Barat,” kata M Attar Rizal.

Ia juga menyampaikan apabila Bulog Jabar siap mensupport seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jabar. “Bulog adalah Badan Pangan BUMN dan kami siap mendukung Provinsi dan Kabupten/Kota di Jawa Barat,” ucapnya. ●**pra**

Sinergitas Pemkab Bogor Bersama Para Alim Ulama



Sinergitas Pemkab Bogor, ulama dan umaro untuk terciptanya kondisifitas.

BOGOR (IM)- Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menyampaikan terima kasih kepada para kyai, alim ulama di Kabupaten Bogor yang selama ini bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam membangun Kabupaten Bogor.

Gelaran acara buka puasa bersama dengan para alim ulama dan tokoh Masyarakat ini dilaksanakan di Gedung Zakat Center BAZNAS Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (3/4).

Hadir pada acara tersebut, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, MUI Kabupaten Bogor, Mathlul Anwar, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bogor, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bogor, para alim ulama dan Tokoh Masyarakat. Hadir mendampingi Pj. Bupati Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra).

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengatakan, semenjak dilantik menjadi Pj. Bupati Bogor, alhamdulillah dirinya merasakan sinergi dan dukungan dari para kyai, alim ulama Kabupaten Bogor. Banyak program pembangunan yang tak mungkin dikerjakan sendiri. Dengan dukungan dan sinergi Pemkab

Bogor bersama para alim ulama semua bisa berjalan dengan baik.

“Terima kasih atas dukungannya selama ini, dukungan para alim ulama sangat kami rasakan, saya berharap selama kepemimpinan kami, terus memberikan dukungan, doa, serta kerja sama untuk kemaslahatan Kabupaten Bogor,” kata Asmawa.

Asmawa menambahkan, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin lima tahun ke depan. Dirinya ingin, Pilkada bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar sehingga bisa melahirkan pemimpin yang bisa membawa Kabupaten Bogor menjadi baladatan tyyibatun warobbun ghofur.

“Selanjutnya, saya juga meminta doa dan dukungannya, kami berencana membangun masjid di sekitar Pakansari. Mudah-mudahan pembangunannya diberikan kelancaran,” ujar Asmawa.

Asmawa mengungkapkan, Kabupaten Bogor memiliki potensi yang luar biasa, dengan gagasan ini insya Allah Kabupaten Bogor punya masjid raya yang lebih representatif. Kemudian ia juga melihat di sekitar Stadion Pakansari belum ada masjid, sehingga masyarakat yang berkegiatan di sana ketika masuk waktu shalat, kesulitan mencari masjid. ●**gio**

8 | Nusantara



ARUS MUDIK DI MERAK MULAI RAMAI

Ratusan kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre saat memasuki Pelabuhan Merak di Banten, Kamis (4/4). Menurut data Posko Merak selama 24 jam terakhir, total kendaraan yang telah menyeberang mencapai 12.439 unit dan jumlah kendaraan menyeberang sejak H-10 hingga H-7 Lebaran mencapai 37.496 unit dengan prediksi puncak arus mudik di Merak terjadi tanggal 5 hingga 7 April.

Sengkarut 100 Hektare Lahan Ploting Pemkab Bogor Diselesaikan Cara Ini

Tim GTRA Kabupaten Bogor akan mengambil jalan Tengah. Lahan ploting untuk Pemkab Bogor yang sebagian menjadi rumah tinggal, sekolah dan rumah ibadah akan diserahkan Pemkab Bogor ke warga, ujar Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto.

CIBINONG (IM)- Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Kabupaten Bogor mengambil jalan tengah atas sengkarut 100 hektar lahan yang diperuntukkan untuk Pemkab

Bogor. Hal itu, karena eksisting di lapangan, di lahan tersebut sudah terbangun rumah milik warga, sekolah, rumah ibadah dan Prasarana Sarana Utiitas

(PSU) lainnya, dan bahkan 30 persen dari 100 hektare lahan sudah bersertifikat.

“Tim GTRA Kabupaten Bogor akan mengambil jalan tengah, lahan ploting untuk Pemkab Bogor yang sebagian menjadi rumah tinggal, sekolah dan rumah ibadah akan diserahkan Pemkab Bogor ke warga,” ujar Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto kepada wartawan, Kamis (4/4).

Membangun Bogor

Eko Mujiarto menuturkan bahwa 50 persen

lahan yang digarap oleh penggarap di luar rumah tinggal, akan diserahkan ke Pemkab Bogor.

“50 persen lahan akan diserahkan oleh penguasa lahan saat ini ke Pemkab Bogor. Hal itu, lebih adil dan hasil kesepakatan bersama antara Tim GTRA dengan pihak yang menguasai lahan tersebut,” tutur Eko Mujiarto.

Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor ATR/Kabupaten Bogor, Taufik Hariono menambahkan umumnya lahan ploting peruntukkan Pemkab Bogor umumnya berbentuk gawir atau berada di lereng

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TINGHS).

Hanya sebagian kecil lahan tersebut berbentuk tanah lapang atau datar. “Lahan tersebut setelah diserahkan ke Pemkab Bogor, rencananya akan dibangun tempat atau Gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat),” tambahnya.

Pengusahan lahan ploting peruntukkan Pemkab Bogor ini terjadi karena over lap, misalnya aset dimiliki pemerintah daerah namun dikuasai secara fisik oleh oknum masyarakat yang umumnya ‘orang-orang besar’. ●**gio**

Pemkab Bogor Gelar Gebyar Adminduk Melalui Pelayanan *One Day Service*

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menggelar Gebyar Administrasi Kependudukan (Adminduk) tahun 2024 sekaligus sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebagai upaya peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Serta memberikan optimalisasi layanan yang berlangsung di Gedung Laga Satria, Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (3/4).

Melalui kegiatan Gebyar Adminduk Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah kepada masyarakat. Sebab dokumen kependudukan ini sangat penting sebagai dasar kepastian hukum bagi status kependudukan seseorang untuk mendapatkan akses ke berbagai pelayanan publik.

Perlu diketahui bahwa, Gebyar Adminduk meru-

pakan pelayanan berskala besar, serentak, terpadu, terintegrasi dengan sistem one day service dengan target 1.200 sampai 200 pemohon.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengungkapkan, Gebyar Adminduk dan sosialisasi IKD pastinya ini adalah salah satu ikhtiar, langkah Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Sebagaimana diketahui dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang besar yakni 5,7 juta jiwa, kegiatan tersebut jadi salah satu upaya untuk percepatan.

“Jangan sampai ada pungutan liar, jika ada maka akan kena sanksi hukum. Jadi masyarakat kalau mengurus langsung saja, karena tidak sulit dan tidak ada yang namanya calo. Untuk perekaman KTP di sini alhamdulillah sudah sangat bagus,” tegas Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi.

Teguh Setyabudi me-

nyatakan bahwa, bukan hanya masyarakat Kabupaten Bogor yang bisa mengurus administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Masyarakat dari luar kota dan luar pulau seperti dari Aceh, Kalimantan, Papua juga bisa ngurus disini.

“Mudah-mudahan semua Kabupaten Kota di seluruh Indonesia bisa melakukan pola-pola pelayanan seperti Gebyar Adminduk yang dilakukan di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Kemudian, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Hadijana menyampaikan, terimakasih kepada Pj. Bupati Bogor dan jajaran Kemendagri atas dukungan sehingga kegiatan ini berjalan dengan sangat baik.

Ia juga menyatakan rasa syukur atas antusias masyarakat yang tinggi terutama atas kesadaran pentingnya administrasi kependudukan bagi masing-masing individu. ●**gio**



Gebyar Adminduk untuk kemudahan mengurus administrasi kependudukan untuk pelayanan *One Day Service*.

SETOR KE KAS DAERAH KAB. BOGOR

Kejari Kembalikan Rp1,4 Miliar Ganti Kerugian Negara dari Koruptor Sumardi

CIBINONG (IM)- Penasehat hukum terpidana Sumardi yaitu Dinalara Butar-butar dan istri serta anak Sumardi menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,4 miliar sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA).

Uang milyaran itu, selanjutnya dimasukkan ke tas uang berwarna biru, untuk diserahkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, untuk disetorkan ke rekening kas daerah Pemkab Bogor.

“Harapan saya kedepan tidak terulang tindak pidana korupsi (Tipikor), dengan dikembalikan hak negara ini, maka permasalahan hukumnya sudah tuntas atau inkraht,” ujar Dinalara Butar-Butar kepada wartawan, Kamis (4/4).

Dinalara Butar-Butar sebelumnya mengajukan terpidana Sumardi untuk mentaati hukum, semua upaya hukum atau banding hingga Kasasi sudah dilakukan olehnya demi meringankan hukuman Sumardi.

“Dengan membayar kerugian negara, maka aset terpidana Sumardi berupa mobil, motor, rumah, lahan dan uang ratusan juta kami harap segera dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Ate Quesyini Iliyas mengaku lega terpidana Sumardi mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,4 miliar.

“Awalnya dalam tuntutan kami memita terpidana Sumardi divonis kurungan penjara 10 tahun dan pengembalian kerugian negara, namun Mahkamah Agung meringankan hukuman terpidana menjadi 6 tahun kurungan penjara dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,4 miliar,” kata Ate Quesyini Iliyas.

Ate Quesyini Iliyas melanjutkan bahwa aset terpidana Sumardi dalam waktu dekat atau pasca Hari Raya Idul Fitri akan dikembalikan ke keluarga dan penasihat hukumnya.

“Hari kerja tinggal besok, kemungkinan aset Sumardi yang sebelumnya kami sita akan dikembalikan keluarga dan penasihat hukumnya terpidana Sumardi,” lanjutnya.

Terpidana Sumardi terbukti melakukan Tipikor dana bantuan bencana alam atau belanja tidak terduga (BTI) Tahun Anggaran 2017. Ia dijerat Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.22 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tipikor. ●**pra**